

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

Ayda Nabila*, Faridah, Irmawati

Universitas Negeri Makasar, Jl. AP. Pettarani Gunungsari, Makasar, Sulawesi Selatan, 90222, Indonesia

*Corresponding author, email: aydanabila2702@gmail.com

Keywords

Implementasi
Kebijakan
Program MBKM

Abstract

This research examines the implementation of Merdeka Belajar – Independent Campus at the Faculty of Education, especially the Study Program The PGSD and PGPAUD Study Programs are study programs that have a participation rate Most students take part in the MBKM program. Approach in this research is a qualitative approach with the type of research being descriptive research. The data collection procedures used were interviews and documentation. The data sources for this research are the University MBKM Team, Faculty Leaders and Leaders of PGSD Study Program and PGPAUD Study Program. The research results show that (1) MBKM policy at Makassar State University (namely) by making MBKM team, compiling guidebooks, preparing supporting administration, Prepare cooperation documents with partners, and accompany students In implementing MBKM, the next task of the MBKM Team is to implement socialization, where in this socialization a strategy is carried out to ensure to make the MBKM Program a success, apart from that the use of technology is also carried out with create a website for implementing MBKM, and coordinate with partners or companies in industrial cooperation so there is a lot of participation from students who take part in the MBKM Program at FIP, especially the Study Program PGSD and PGPAUD Study Programs. FIP's role in supporting and Facilitation is by simplifying documents and coordinating FIP and Study Programs in implementing MBKM. Thus, the results of implementing MBKM are fruitful Assessment of the MBKM Program in the PGSD Study Program and PGPAUD Study Program is on campus Teaching and Student Exchange are both compatible activities learning in the PGSD Study Program and PGPAUD Study Program. (3) Internal Supporting Factors implementation of MBKM, namely the existence of a Guidebook, the existence of an MBKM Team, and the existence of Meanwhile, collaboration between the MBKM Team, FIP and Study Program in implementing MBKM The inhibiting factor is the lack of communication regarding the implementation of MBKM, and there are MBKM programs that are not in line with learning in Study Programs, especially PGSD Study Program and PGPAUD Study Program.

Abstrak

Fokus penelitian adalah bagaimana Implementasi dan faktor pendukung dan faktor penghambat Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD sebagai Prodi yang memiliki tingkat partisipasi mahasiswa terbanyak mengikuti program MBKM. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah Tim MBKM Universitas, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) Kebijakan MBKM di Universitas Negeri Makassar (yaitu) dengan membuat Tim MBKM, menyusun buku panduan, menyiapkan administrasi pendukung, Menyiapkan dokumen kerjasama dengan mitra, dan Mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM, selanjutnya (2) Tugas Tim MBKM yaitu melakukan sosialisasi, dimana dalam sosialisasi ini dilakukan strategi dalam memastikan keberhasilan Program MBKM, selain itu dilakukan pemanfaatan teknologi dengan membuat Website pelaksanaan MBKM, serta melakukan koordinasi mitra atau perusahaan dalam kerjasama industry sehingga banyaknya partisipasi dari mahasiswa yang ikut melaksanakan Program MBKM di FIP khususnya Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD. Adapun peran FIP dalam mendukung dan memfasilitasi yaitu dengan mempermudah dokumen serta koordinasi FIP dan Prodi dalam pelaksanaan MBKM. Sehingga, hasil implementasi MBKM menghasilkan penilaian Program MBKM di Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD adalah Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa, yang keduanya sesuai dengan kegiatan pembelajaran di Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD. (3) Faktor Pendukung dalam pelaksanaan MBKM yaitu adanya Buku Panduan, adanya Tim MBKM, dan adanya kerjasama Tim MBKM, FIP dan Prodi dalam pelaksanaan MBKM, sedangkan Faktor penghambat yaitu kurangnya komunikasi mengenai pelaksanaan MBKM, dan terdapat

How to cite: Nabila, A., Faridah, F. & Irmawati, I. (2024). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 9(1). 31–38. doi: 10.17977/um027v9i12024p31-38

1. Pendahuluan

Keberadaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) membawa paradigma baru dalam dunia pendidikan. Konsep MBKM, berarti kebebasan berpikir harus ada inisiatif dari para pendidik. Perspektif ini harus dilihat sebagai upaya untuk menilai perubahan pembelajaran mulai dari Tingkat pertama menengah sampai Pendidikan Tinggi. Konsep MBKM self-directed learning yang bertujuan untuk mendobrak belenggu dan memudahkan pergerakan pada rana Perkuliahan untuk mahasiswa.(Tuti Marjan Fuadi 2022).

Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan mahasiswa, mengembangkan kepekaan sosial dan memperkuat karakter siswa bentuk dari kebijakan MBKM yang membawa kemandirian dan modernisasi bidang pendidikan sehingga berdampak nyata bagi peserta didik dalam pembentukan karakter atau kepribadiannya (Nanggala agil and suryadi karim 2020).

Landasan tentang MBKM yang diatur dalam peraturan UUD Nomor 20 tahun 2003 yang mengatur sistem pendidikan nasional dengan adanya landasan terkait kebijakan MBKM, yaitu: “melalui sistem pendidikan nasional menjamin pemerataan, meningkatkan kualitas dan memberikan kesempatan pendidikan dan kecukupan guna menjawab tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional global”.

Lanjutan kemudian disingkat menjadi peraturan, yaitu: 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum, 3) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Akademik dan Perguruan Tinggi, 4) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TIDAK. 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. Nomor. 7 tentang pendirian perubahan, penghapusan (Puspitasari & Nugroho 2021)

Seseorang yang mengenyam Pendidikan tinggi harus mampu membuat riset secara mendisiplin ilmu sehingga akan menghasilkan inovasi yang lebih keilmuan, apalagi diseluruh aspek kehidupan berkesinambungan dengan teknologi merupakan salah satu kebijakan MBKM (Lao and Hendrik 2020).

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan sebuah terobosan baru yang dikeluarkan pemerintah khususnya Kemendikbudristek RI, kebijakan ini bersifat nasional dengan menerapkan sistem sentralisasi atau dari pusat kemudian diturunkan ke setiap daerah. Kebijakan ini memiliki payung hukum yang jelas, bertujuan untuk memberikan otonomi lebih bagi PT agar mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, selain itu Merdeka Belajar– Kampus Merdeka juga mengarahkan ilmu maupun penguasaan teknologi agar kiranya mampu merespon perkembangan industri, dan yang paling penting adalah memperbaiki mutu Pendidikan Indonesia.

Proses penyelenggaraan dilakukan melalui perguruan tinggi dan mendukung mahasiswa program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Tahapan MBKM harus melalui seleksi yang dilakukan oleh TIM MBKM pusat, tahap tugas dilakukan, dimana proses ini terjadi dilakukan sebelum survei ditugaskan, persiapan berupa observasi, wawancara dan proses tugas.

Universitas Negeri Makassar membentuk tim MBKM dengan memaksimalkan sosialisasi Fakultas yang ada di Universitas Negeri Makassar untuk memberikan informasi terkait Program-program yang akan dijalankan oleh mahasiswa, sehingga masuklah informasi terkait MBKM ke FIP, informasi tersebut membuat mahasiswa ingin melaksanakan program MBKM, sebagaimana dari

website resmi mbkm yaitu mbkm.unm.ac.id yang membagikan hasil keseluruhan dari semua fakultas Di Universitas Negeri Makassar, FIP merupakan jenjang pertama dalam penyelenggaraan program “Program studi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka”, dan yang paling diminati adalah program studi FIP dan pengembangan satuan pendidikan dengan meningkatkan kemungkinan mata kuliah penunjang Pendidikan. Hal ini akan dipertimbangkan dalam satuan pengajaran sesuai dengan kegiatan pengajaran.

Kebijakan MBKM FIP mengikuti pedoman Kementerian dan dikelola oleh Universitas Negeri Makassar. Secara umum Kebijakan MBKM Di FIP dinaungi oleh Universitas Negeri Makassar.yaitu: (1) mendorong agar mahasiswa ikut terlibat di dalam program MBKM, (2) Fakultas, prodi/jurusan memberikan jaminan rekognisi sesuai dengan Buku Panduan MBKM, (3) dari sisi Fakultas dan jurusan juga ikut memfasilitasi yang berminat dalam Program MBKM (rekomendasi mahasiswa, dan rekomendasi dosen).

Terdapat penelitian terdahulu yaitu, Maulana (2022) juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu tentang SDM yang unggul dan kompetitif dalam mewujudkan perguruan tinggi terkait di Universitas Muhammadiyah Jakarta mengenai implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merddeka (MBKM), terdapat penelitian oleh Agustina Mei (2022) yang tujuannya untuk Pendidikan sejarah Universitas Flores pada perguruan tinggi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka”. Kajian serupa juga muncul oleh Ratna Puspitasari dkk (2022) dengan judul “implementasi kebijakan MBKM yang menyasar FISIO UPN veteran Jawa Timur 022.

Dari beberapa peneliti-peneliti diatas, jelas bahwasanya terdapat perbedaan yaitu : Peneliti akan melakukan Penelitian di FIP khususnya pada Prodi (PGSD) dan (PGPAUD) karena mahasiswa banyak yang tertarik dengan kegiatan MBKM. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin mengetahui dan mengembangkan lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Dalam pelaksanaan kampus Merdeka Kebijakan yang menawarkan mahasiswa memberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan keterampilan dan minat mereka dan langsung memasuki dunia kerja saat mereka mempersiapkan karir masa depan mereka (Wiwin Priana et al. 2020)

Nadiem Makarim mendukung terciptanya fleksibilitas di perguruan tinggi, terutama dengan meningkatkan kapasitasnya untuk membantu mahasiswa memperoleh ilmu yang lebih luas diluar kampus (Mei, Naja, and Kusi 2022)

Program ini dirancang agar mampu menambahkan wawasan mahasiswa dalam meningkatkan karakter dan keterampilan yang lebih baik. Yang menyelesaikan program mahasiswa dengan harapan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan akan menjadi lulusan yang lebih kompetitif. MBKM menawarkan peluang lapangan yang kontekstual yang dapat memperkuat keterampilan mahasiswa secara keseluruhan, mempersiapkan mereka untuk bekerja atau membangun karir baru. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membentuk hard skills dan soft skills mahasiswa yang sangat dipengaruhi oleh rencana pembelajaran individu yang terencana dan dilaksanakan dengan baik (Iqbal Lhutfi and Rika Mardiani, n.d.)

Menurut (Mudrikah et al. 2022) terdapat tiga pokok utama yang membantu mendorong diberlakukannya kegiatan tersebut, yaitu Kualitas unggulan lulusan, Keunggulan dalam kualifikasi pascasarjana; 1) Dunia bisnis bergerak begitu cepat, tidak perlu menunggu lama setelah lulus. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dibidangnya dengan upah minimum diwilayahnya dengan perusahaan menggunakan jasanya sebagai mitra, konsultan, atau karyawan.; 2) melalui pertukaran pelajar, magang penelitian dan proyek desa ,mahasiswa bisa langsung terjun ke dunia bisnis karena telah mempunyai pengalaman belajar langsung dimasyarakat. Kualitas dosen atau guru, Peningkatan kualitas tenaga pengajar disebabkan oleh: 1) pengalaman, pemahaman dan

pengetahuan pengajar melalui kegiatan ekstra perkuliahan, juga dengan dunia industri dan dengan kompetensi lainnya, 2) transfer informasi dari wirausaha langsung ke perkuliahan, 3) langsung diterapkan ke dunia industri dengan hasil penelitian dan jasa dosen. Mutu Kurikulum, Mutu kurikulum ditingkatkan melalui dunia luar yang bekerjasama dengan sekolah: 1) Dunia industri menjalin kerjasama sesuai dengan kurikulum diajarkan, sehingga peserta didik dapat magang atau magang di perusahaan yang disesuaikan dengan keahliannya, 2) menarik siswa untuk mengikuti penelitian atau pelatihan di perusahaan tertentu, lembaga pendidikan yang menawarkan hal tersebut secara tidak langsung kepada siswa dalam praktik melalui keterampilan yang dimilikinya, 3) Kerja sama tidak hanya dapat dilakukan dengan perusahaan dalam negeri, namun juga dapat dilakukan dengan universitas atau perusahaan luar negeri untuk membantu mengembangkan program penelitian agar dapat mencapai tujuan yang lebih luas.

Mengikuti program yang sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh mahasiswa yang dapat memilih program diatur dalam (Permendikbud RI No.3, 2020) Pasal 15 ayat 1. yang dapat diikuti oleh mahasiswa: Program Magang, Program magang bersertifikat memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang di luar ruangan. Mendapatkan pengalaman kerja yang profesional dalam 1-2 semester merupakan kelebihan dari magang bersertifikat. (Prof. Ir. Nizam, n.d.). Program mahasiswa Pertukaran Merdeka, Memberikan kesempatan kepada mahasiswa menempuh mata kuliah diperguruan tinggi lain dengan memberikan pengambilan kredit poin, transfer kredit, dan non kredit poin. kajian akademis dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan pemahaman antar budaya. (Hasnawi Haris, n.d.). Program Riset atau Penelitian, Sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 terkait Riset/ Penelitian adalah suatu bentuk kegiatan pembelajaran dan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan melalui peran dan partisipasi dalam kegiatan penelitian kepada mahasiswa diterapkan. (Hasnawi Haris, n.d.). Program Proyek Independen atau Studi Independen, Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas diluar kelas perkuliahan, dan tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Studi independent bersertifikat merupakan bagian dari program yang diperuntukkan bagi 21 mahasiswa yang mempunyai keahlian praktis dan spesifik yang dicari oleh dunia industry yang merupakan penjelasan dari Studi independent bersertifikat (Hasnawi Haris 2021). Program Kampus Mengajar, Pengajaran berbasis sekolah/ Kampus Mengajar adalah suatu proses pengajaran di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa program Sekolah Merdeka, sehingga mahasiswa dari seluruh fakultas dan universitas di seluruh Indonesia dapat berpartisipasi, berkembang dan membawa perubahan. Sekolah dasar dan menengah khususnya di daerah 3T (daerah sulit, terpencil dan tertinggal) (Ana Widyastuti 2022b). Program Kewirausahaan, Kewirausahaan Merupakan kegiatan bagi mahasiswa yang memberikan kesempatan untuk menciptakan kegiatan komersial dengan menganalisis peluang pasar. Pembelajaran bisnis merupakan praktik bisnis dengan terencana dan terprogram. Bisnis bisa berupa produk atau jasa. Program ini diharapkan dapat mengawali munculnya wirausahawan dari kalangan akademisi yang mampu menciptakan lapangan kerja berskala besar (Ana Widyastuti 2022b). Program Proyek Kemahasiswaan, Mengembangkan kegiatan kemanusiaan secara mandiri, dengan penjelasan yang direkomendasikan melalui kegiatan manusia, proyek ini dapat berupa kegiatan sosial dengan yayasana atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh universitas maupun universitas lain dengan memberikan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa (Firdaus 2019). Program perkuliahan Desa/Kerja Nyata Tematik (KKN tematik), Memanfaatkan pengalaman belajar diluar kampus yang langsung bersama masyarakat untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dengan mengusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan desa yang ada yang merupakan bentuk dari program Perkuliahan Desa/Kerja Lapangan Tematik (KKNT. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dirancang dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill, kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan (Dr. Nurkholis, Dr. Muhamad Sholeh, and Dr. Moch.Jacky. M.Msi 2022).

2.2. Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Tindakan atau rencana yang disusun secara merata dan terperinci merupakan salah satu penjelasan dari implementasi. Implementasi biasanya terjadi setelah perencanaan yang dianggap sempurna. Parson berpendapat yang dikutip dalam (Nur Asiah 2021). menciptakan hubungan sebab-

akibat dalam kebijakan yang memberikan dampak dan tindakan yang diambil agar mencapai tujuan yang interaktif merupakan proses dari implementasi.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh kurikulum sebagai syarat memasuki dunia kerja setelah memperoleh ijazah sarjana muda atau terapan, perlu dilaksanakan studi mandiri - berbasis akademik. Praktek mandiri memberikan kesempatan memperoleh keterampilan (Rochana and R. M. Darajatun 2021). Dalam praktiknya, mahasiswa diberikan keleluasaan dalam program gelar mereka untuk melakukan kegiatan di luar kelas selama dua semester.

Kemampuan dalam menguasai semua ilmu yang ada di dunia kerja merupakan Tujuan yang dapat meningkatkan kompetensi yang lebih baik agar mampu dan siap pada kebutuhan zaman dengan mengikuti implementasi merdeka belajar - kampus merdeka, program "hak belajar tiga semester diluar program studi" (Nizam 2020).

2.3. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Program MBKM harus didasarkan pada tujuan dan prinsip kegunaan yang jelas. Kebijakan sebagai instrumen teknis, rasional dalam menyelesaikan masalah. Lembaga Pendidikan dengan lulusan skala nasional ataupun global dalam meningkatkan daya saing lulusan dari kebijakan yang diterapkan. Kebijakan semakin implementatif dan mempunyai payung hukum, yaitu tentang akreditasi kurikulum dan pendidikan tinggi melalui peraturan kemedikbud, Akreditasi Program akademik dan pendidikan tinggi, penerimaan mahasiswa baru Profram perguruan tinggi dan penetapan, revisi dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta yang ditaur pada peraturan kemendikbud nomor 5, Nomor 6, dan Nomor 7 tahun 2020, terdapat aturan yang menyatakan: "mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Waktu dan lamanya belajarmengikuti seluruh proses pembelajaran dalam kerangka di kampus, selama 1 (satu) semester (20 kredit) dan di luar kampus. Dan peraturan yang mengatur tentang standar Pendidikan tinggi melalui Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor Nomor 1 Nomor 3 Tahun 2020 pasal 18 n. (Ana Widyastuti 2022a).

2.4. Pro-kontra kebijakan MBKM

Mengenai kebijakan yang diusung oleh Nadiem Makarim, masyarakat sedikit demi sedikit mulai berdiskusi terkait program tersebut. Pro dan kontra bermunculan di tengah masyarakat, terkait yang pro mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat mendorong mahasiswa yang kurang mempunyai skil dan wawasan sehingga lebih berkembang kemampuannya dengan mengikuti kegiatan diluar kampus, disamping kegiatan belajar mengajar di kelas, mahasiswa dituntut untuk mampu berinteraksi dengan baik di masyarakat, maka dari itu mahasiswa tersebut dapat memperbanyak wawasan dan pengalaman dalam membuka skill yang ada didalam diri mereka

Sedangkan yang kontra memandang sebagai hal yang negatif dan tidak memiliki manfaat yang optimal bagi mahasiswa. Kebijakan ini banyak diragukan di kalangan Dosen, Mahasiswa dan Masyarakat luar karena mengubah cukup banyak hal fundamental dalam Pendidikan di perguruan tinggi, salah satunya kurikulum. Program magang bagi mahasiswa di kemudian hari, perlu ada pengaturan yang jelas terkait program MBKM.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan variable yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu - satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di FIP yang beralamat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kecamatan Rappocini di Jl. Tamalate No.1 Tidung.

Sumber data penelitian ini adalah Kelompok MBKM Universitas Negeri Makassar, WD 1 yang membidangi akademik dan Ketua Program Akademik PGSD dan PGPAUD. Karena dianggap mengetahui proses penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di FIP.

Dalam menjamin kredibilitas data terhadap hasil penelitian yang dilakukan yaitu keabsahan data dengan berbagai macam cara, Teknik triangulasi yaitu digunakan pada peneliti ini yaitu Triangulasi data, triangulasi sumber dan triangulasi metode. Tahap pra-lapangan, tahap analisis data, tahap pekerjaan lapangan dan tahap penulisan laporan merupakan bagian dari tahap-tahap dalam penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam Implementasi Program MBKM di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi yang memiliki tingkat mahasiswa tertinggi mengikuti Program MBKM yaitu Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD dengan jumlah mahasiswa yang selalu meningkat setiap semester.

Prodi PGSD adalah bagian dari FIP Universitas Negeri Makassar memiliki beberapa tempat yang tersebar di Sulawesi Selatan mulai dari makassar, pare-pare dan watampone. Mahasiswa dari PGSD sangat antusias mengikuti kegiatan dari Program MBKM yang diselenggarakan oleh kemendikbud karena sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh program mbkm khususnya program kampus mengajar, melalui hasil survei dari Tim MBKM UNM PGSD merupakan Prodi yang paling tinggi mengikuti kegiatan Program MBKM.

Prodi PGPAUD atau yang disebut sebagai Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, sama dengan halnya PGSD, PGPAUD merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang khusus menangani Pendidikan anak usia dini, PGPAUD merupakan Prodi yang memiliki tingkat keaktifan mengikuti kegiatan MBKM yang cukup signifikan dibandingkan Prodi-Prodi lainnya.

Fakultas Ilmu Pendidikan tidak terlepas dari Peraturan Kementerian untuk melaksanakan Program MBKM di setiap Perguruan Tinggi, kemudian Pihak Universitas Negeri Makassar yang melaksanakan kebijakan mulai dari tahap pembentukan Tim MBKM sampai pada tahap proses pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan yang mengatur persiapan pelaksanaan MBKM yang berkoordinir dengan Prodi khususnya Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD dalam melaksanakan Program MBKM.

4.2. Hasil Penelitian

Sesuai dengan penelitian terkait pelaksanaan Program MBKM di Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pembahasan mencakup kebijakan MBKM yang ada di Universitas dengan mempunyai tugas dan tanggung jawab Tim MBKM yaitu mulai dari Sosialisasi, Strategi, pemanfaatan Teknologi, kerjasama Industri dan Partisipasi Mahasiswa dan dilanjutkan dengan peran FIP dalam mendukung pelaksanaan MBKM mulai dari persiapan dokumen pendukung pelaksanaan MBKM dan koordinasi FIP dengan Prodi dan dilanjutkan ke Implementasi Program MBKM di Prodi mulai dari Program - Program MBKM, pelaksanaan MBKM di Prodi dan penilaian prodi dalam pelaksanaan MBKM, sampai pada Faktor Penghambat dan Pendukung dalam melakukan Program MBKM.

4.2.1. Kebijakan Program MBKM

Dalam pelaksanaan MBKM pada kebijakan dilakukan agar pelaksanaan MBKM bisa terkoordinir dengan baik, maka perlu adanya kebijakan yang disediakan oleh Universitas, Fakultas dan Prodi agar pelaksanaan MBKM bisa berjalan dengan baik. Kebijakan yang ada di Universitas melalui kebijakan terkait pembuatan Tim MBKM, menyiapkan dokumen kerjasama dengan mitra, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada MBKM yang melakukan kegiatan pendampingan.

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Program MBKM terdapat kebijakan yang dijalankan di Universitas Negeri Makassar:

1. Menyediakan panduan penyelenggaraan pada Tingkat universitas dan memberikan payung kebijakan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

2. Menetapkan dan menugaskan Unit Pengelola MBKM Universitas sebagai Koordinator Pengelola dan Pelaksana MBKM tingkat Universitas (TIM MBKM).
3. Dalam mendukung kebutuhan system manajemen akademik perlu menyiapkan berbagai kebutuhan dari portal Program MBKM Universitas
4. Strategi mitra melalui Kerjasama Tingkat sekolah dengan mempersiapkan dokumen Kerjasama.
5. Pengembangan yang dilakukan melaluo dukungan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Adapun tugas TIM MBKM dalam pelaksanaan MBKM mulai dari sosialisasi, pemanfaatan teknologi, kerjasama industry, dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Penyampaian pesan dan Menginformasikan merupakan proses dari seseorang keorang lain dan mengubah sikap, tidak langsung ataupun secara langsung merupakan bagian dari keberlanjutan sosialisasi (Gunawan 2012), sosialisasi dilaksanakan oleh Tim MBKM Universitas Negeri Makassar untuk menginformasikan kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan kemudian menyampaikan kepada Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD untuk disosialisasikan kepada mahasiswa agar pelaksanaan Program MBKM berjalan terus menurus di Fakultas Ilmu Pendidikan.

Dari pengamatan dan peneliti melakukan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa tugas tim MBKM di awal program yaitu mengurus dan mengoordinir kegiatan MBKM mulai dari mensosialisasikan program MBKM dengan dibuatkan panduan agar aktivitas akademik dari mahasiswa dan dosen di unum dapat mengatur kegiatan yang dilakukan pada program MBKM, kemudian dilaksanakan registrasi, pelaksanaan, pelaporan, penilaian rekognisi kegiatan dan sampai pada tahap konversi nilai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Proses koordinasi program MBKM dikelola melalui situ resmi yaitu Sim MBKM, yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan program MBKM yang telah dijalankan hal tersebut berupa pendaftaran yang bisa diakses langsung dan juga pelaksanaan kegiatan program MBKM yaitu logbook yang dikelola langsung oleh mahasiswa itu sendiri. Sama halnya dengan sosialisasi, strategi, pemanfaatan teknologi, kerjasama industri, dan pemanfaatan teknologi proses koordinasi dilakukan oleh tim MBKM Universitas Negeri Makassar yaitu melalui Sim MBKM yang dikelola langsung oleh Tim MBKM dengan koordinasi dari Fakultas, prodi dan mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa tugas Tim MBKM Perguruan Tinggi dalam program MBKM berfokus pada koordinasi yang dilakukan mulai dari sosialisasi sampai kepenilaian mahasiswa dengan pimpinan Fakultas, Prodi dan Mahasiswa agar pelaksanaan program MBKM terus meningkat setiap semester melalui koordinasi.

4.2.2. Peran Fakultas Ilmu Pendidikan dengan pelaksanaan MBKM

Kemendikbudristek yang melakukan kolaborasi baik dari perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa serta industry yang saling bekerjasama merupakan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Peran FIP dalam pelaksanaan dan pada tahapan evaluasi menjembatani proses penugasan mahasiswa dalam program. Peran fakultas dalam penyelenggaraannya memiliki peran untuk melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan penelitian dan kegiatan PKM untuk pengembangan ilmu. Untuk menjalankan peran fakultas tersebut, dalam lingkup MBKM fakultas berperan dalam hal sebagai berikut (a) mengimplementasikan kebijakan universitas terkait Kegiatan MBKM; (b) memberikan ruang bagi prodi untuk melaksanakan kegiatan MBKM seperti menyediakan mata kuliah lintas Prodi; (c) memonitoring dan mengevaluasi kegiatan MBKM; (d) mensosialisasikan kegiatan MBKM kepada dosen, mahasiswa, dan karyawan; serta (e) menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan mitra dalam menjalankan program MBKM.

Berdasarkan uraian tentang peran Fakultas, kemudian dalam penelitian ini subjek penelitiannya ialah FIP sesuai dengan hasil wawancara dengan Pimpinan Fakultas yaitu WD Bidang Akademik Fip UNM yang mengordinir pesiapan pelaksanaan MBKM seperti dokumen pendukung yang disiapkan oleh mahasiswa, pimpinan Fip juga mendukung secara penuh dalam hal menyetujui

persetujuan mahasiswa dalam kegiatan program MBKM dalam bentuk surat tugas yang akan digunakan mahasiswa dalam mendaftar program MBKM.

Selain dengan mahasiswa, Fakultas Ilmu Pendidikan juga melakukan koordinasi dengan prodi dan dosen pembimbing lapangan yang berkoordinir dalam pelaksanaan program MBKM yang diharapkan mampu mengatur dan mengordinir mahasiswanya dalam mengatur pelaksanaan program MBKM Fakultas bersama dengan prodi melakukan monitoring dan juga Kerjasama antara industry dalam pelaksanaan kegiatan MBKM dengan melakukan pengawasan dan pendataan mengenai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan adalah dengan menerapkan Tim MBKM untuk mengordinir segala bentuk kegiatan mulai dari pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi melalui SIM MBKM.

Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara terlihat bahwa Program MBKM terlaksana dengan baik pada mahasiswa di FIP, dengan mendukung pelaksanaan MBKM melalui persiapan dokumen dan koordinasi dengan Prodi dan dosen-dosen, yang memberikan ruang dan dukungan terhadap kegiatan tersebut, dan memonitoring mulai dari sosialisasi sampai pada tahap evaluasi program MBKM.

4.2.3. Implementasi Program MBKM di Prodi

Program MBKM dilaksanakan sebagai bentuk membantu mahasiswa dalam mempermudah penyelesaian di Studinya, MBKM dilaksanakan melalui tahapan kementerian yang diatur dan dikelola oleh Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi dan sampai ke mahasiswa yang melaksanakan kegiatan program MBKM, pelaksanaan MBKM di Prodi dikelola oleh Pimpinan yang membantu mahasiswa mempermudah pelaksanaan MBKM, Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD yang merupakan Prodi yang memiliki partisipasi mahasiswa terbanyak mengikuti kegiatan MBKM khususnya Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa yang sejalan dengan pelaksanaan pembelajaran di Prodi (Laga et al. 2021).

Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara bahwa dari delapan Program MBKM, Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD memaksimalkan MBKM yaitu Program Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa karena Program tersebut sejalan dengan Pembelajaran yang dijalankan, walaupun dari Prodi PGPAUD tidak sejalan tetapi dari mahasiswa banyak yang antusias mengikuti Program MBKM, maka dari untuk memecahkan masalah Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD menjalankan MBKM Mandiri yang mempermudah mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan MBKM yang bisa disesuaikan dengan Pembelajaran yang ada di Prodi. Setelah tahapan program MBKM dan pelaksanaan maka terdapat penilaian yang dilakukan oleh Prodi PGSD dan Prodi PGPAUD.

Seluruh pelaksanaan program yang dilakukan oleh prodi tentunya masih ada terdapat kekurangan berupa kendala ataupun hambatan seperti belum teraturnya program studi yang bisa direkognisi untuk seluruh program MBKM, kurangnya komunikasi dengan pimpinan atau industry dalam proses pelaksanaan program MBKM. Tetapi walaupun terdapat beberapa kendala namun prodi tetap melaksanakan dan menyelesaikan program MBKM dengan baik dan menghasilkan manfaat bagi pihak-pihak terkait dengan memperbaiki beberapa hal yang menghambat proses program MBKM.

4.2.4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat melalui Tim MBKM, Fakultas, dan Prodi

Dalam faktor pendukung mulai dari Tim MBKM, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Prodi mahasiswa dalam program MBKM dan juga mitra yang banyak dikembangkan sehingga dalam hambatan tersebut perlu adanya cara mengatasi hambatan dengan melakukan kordinasi lebih intens yang memberikan pemahaman yang lebih kompleks bagaimana mengkomunikasi program-program MBKM yang akan dijalankan dan juga mengarahkan pada program MBKM mandiri dimana program tersebut sejalan dengan kegiatan program studi yang dilaksanakan agar rekognisi matakuliah bisa berjalan sesuai peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. lebih mengarah pada insentif yang diberikan oleh mahasiswa dalam program MBKM dan juga mitra yang banyak dikembangkan sehingga banyak mahasiswa yang bisa mengikuti kegiatan tersebut, kebijakan yang ditentukan oleh prodi yang membuat terlaksananya program MBKM berjalan dengan baik sedangkan Faktor Penghambat yaitu komunikasi mulai dari Tim MBKM, Fakultas, prodi dan mahasiswa sering tidak terkordinir dengan baik, dan juga mengenai rekognisi dengan program MBKM.

Banyak mahasiswa yang bisa mengikuti kegiatan tersebut, kebijakan yang ditentukan oleh prodi yang membuat terlaksananya program MBKM berjalan dengan baik sedangkan Faktor Penghambat yaitu komunikasi mulai dari Tim MBKM, Fakultas, prodi dan mahasiswa sering tidak terkoordinir dengan baik, dan juga mengenai rekognisi dengan program MBKM yang dijalankan karena tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dilapangan dan juga perlu berkordinasi dengan pimpinan fakultas agar dosen mampu mengetahui kewajibannya dalam membimbing mahasiswa dalam program MBKM. Yang dijalankan karena tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dilapangan dan juga perlu berkordinasi dengan pimpinan Dalam hambatan tersebut perlu adanya cara mengatasi hambatan dengan melakukan kordinasi lebih intens yang memberikan pemahaman yang lebih kompleks bagaimana mengkomunikasi program-program MBKM yang akan dijalankan dan juga mengarahkan pada program MBKM mandiri dimana program tersebut sejalan dengan kegiatan program studi yang dilaksanakan agar rekognisi matakuliah bisa berjalan sesuai peraturan dan panduan yang telah ditetapkan fakultas agar dosen mampu mengetahui kewajibannya dalam membimbing mahasiswa dalam program MBKM.

Daftar Rujukan

- Firdaus, I. (2019). Implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Retrieved from <http://eprints.untirta.ac.id/1438/>
- Gunawan. (2012). Sosialisasi.
- Hasnawi, H., dkk. (n.d.-a). *Petunjuk teknis penelitian/riset*.
- Hasnawi, H. (2021). *Petunjuk teknis pertukaran pelajar*.
- Hasnawi, H. (n.d.-b). *Petunjuk teknis pertukaran pelajar*.
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2021). Persepsi mahasiswa terhadap kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 699–706. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1951>
- Lao, H. A. E., & Hendrik, Y. Y. C. (2020). Implementasi kebijakan kemerdekaan belajar dalam proses pembelajaran di Kampus IAKN Kupang-NTT. *Dedikasi*, 4. Retrieved from <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Lhutfi, I., & Mardiani, R. (2020). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Policy: How Does It Affect the Sustainability on Accounting Education in Indonesia?. *Dinamika Pendidikan*, 15(2), 243-253.
- Marjan Fuadi, T. (2022). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) : Aplikasinya Dalam Pendidikan Biologi. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9(2), 38. <https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11594>
- Mei, A., Naja, F. Y., & Kusi, J. (2022). Implementasi kebijakan 'Merdeka Belajar, Kampus Merdeka' pada perguruan tinggi swasta: Survei pendidikan sejarah Universitas Flores. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2066–2076. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2010>
- Mudrikah, A., Khori, A., Hamdani, H., Holik, A., Hakim, L. L., Yasmadi, B., & Hidayat, H. (2022). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Nusantara. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 137. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2177>
- Nanggala, A., & Karim, S. (2020). Analisis konsep Kampus Merdeka dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen*.
- Nizam. (2020). *Buku panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Nizam. (n.d.). *Panduan magang dan studi independen bersertifikat*.
- Nur Asiah. (2021). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar).
- Nurkholis, Sholeh, M., & Jacky, M. (2022). *Panduan KKN Tematik MBKM*.
- Priana, W., Pudjo, H., Sishadiyati, S., & KW, N. I. (2020). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)*, 1(4).
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i2.2539>
- Rochana, & Ramdhany R. M. D. (2021). Pengaruh implementasi kebijakan Kampus Merdeka terhadap minat dan keterlibatan mahasiswa. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Widyastuti, A. (2022a). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka*.
- Widyastuti, A. (2022b). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Tantangan dan strategi implementasinya pendidikan tinggi di era baru 4.0*.